

RENCANA KERJA



**PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif. Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Pertanian perlu menyusun Rencana Kerja SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2023, sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja juga ditujukan untuk menjaga keseimbangan kegiatan pembangunan dalam fungsi sebagai penanggung jawab serta sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian.

Renja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2023 disusun mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta usulan program yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya Renja SKPD Tahun 2023 ini dibuat guna memecahkan berbagai permasalahan pembangunan bidang pertanian di Provinsi Maluku.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja berkaitan erat dengan RPJMD serta disusun dengan memperhatikan rencana kerja Pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Pertanian. Hal ini penting guna mewujudkan sinergitas pusat dan daerah sekaligus bentuk dukungan daerah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang pertanian.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Tahun 2024 secara umum adalah untuk memberikan gambaran

mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pertanian untuk satu tahun mendatang. Sedangkan secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan dan pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian.
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2023.
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023.
4. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan.
5. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2023 dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Maluku
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

Pelaksanaan pembangunan pertanian tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan arahan VISI “Terwujudnya Pertanian Berbasis Kepulauan yang Mantap dan Berkelanjutan Menuju Maluku yang Sejahtera”. Sedangkan MISI yang diusung adalah : 1) Mewujudkan peningkatan produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian, 2) Mewujudkan Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, 3) Mewujudkan sumber daya manusia di bidang pertanian yang berkualitas, 4) Mewujudkan sinergitas perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (2022) dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilaporkan dalam Tabel 2.1.

Sasaran strategis Renstra 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- 1.** Menurunnya tingkat kemiskinan petani
- 2.** Meningkatnya produksi pertanian
- 3.** Meningkatnya kelas kemampuan petani yang mengikuti pelatihan
- 4.** Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun untuk mengetahui capaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perbandingan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut akan dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD belum seluruhnya mencapai sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci. Secara tabulatif pesentase capaian indikator kinerja tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Urusan Pilihan									
3,27	PERTANIAN									
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.27.01.1.01.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.27.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Dokumen						
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 Orang	339 Orang	176 Orang	176 Orang	100,00	176 Orang	176 Orang	100,00
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan						
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.27.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%						
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Perlitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	32 unit	32 unit	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	100,00	2 Paket	2 Paket	100,00
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit	8 unit						
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bertambahnya Kendaraan Pendukung Operasional Dinas (Unit)	8 unit	8 unit	4 Laporan	4 Laporan	100,00	8 unit	8 unit	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00			100,00
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3 Unit	4 Laporan	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Unit	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%				
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	3 Unit	100,00
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	1 Unit	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)								
		- Daging	3,382 Ton	3,493 ton	3.550 Ton	4.371 Ton	123,12	3.728 ton	3.728 ton	100,00
		- Telur	4,382 Ton	3,972 Ton	4.513 Ton	6.422,63 Ton	142,31	4.649 ton	4.649 ton	100,00
		- Padi	162,229 Ton	115,067 Ton	121.768 Ton	99.210 Ton	81,47	132.857 ton	132.857 ton	100,00
		- Jagung	62,353 Ton	16,56 Ton	19,51 Ton	31,40 Ton	160,9	29,65 ton	29,65 ton	100,00
		- Kedelai	5 Ton	7 Ton	3,41 Ton	13 Ton	381	25 ton	25 ton	100,00
		- Pala	5,449 Ton	5,746 Ton	5.862 Ton	5.914 Ton	100,88	5.915 ton	5.915 ton	100,00
		- Cengkeh	22,479 Ton	21,244 Ton	21.605 Ton	21.964 Ton	101,6	23.387 ton	23.387 ton	100,00
		- Kelapa	106,469 Ton	106,634 Ton	108.447 Ton	109.032 Ton	100,53	110.770 ton	110.770 ton	100,00
3.27.02.1.0 1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian	100%	100%	100%	100%				
3.27.02.1.01. 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	50Ton	50Ton	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02.1.0 2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								
3.27.02.1.02. 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	3 Sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	100,00	3 Sertifikat	3 Sertifikat	100,00
3.27.02.1.02. 02	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan (Kabupaten)	5 Laporan (Kabupaten)	100,00
3.27.02.1.02. 03	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu,	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00	10 Laporan (Kabupaten/Kota)	10 Laporan (Kabupaten/Kota)	100,00
3.27.02.1.02. 04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Perkebunan	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan (Kabupaten)	4 Laporan (Kabupaten)	100,00
3.27.02.1.0 3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	2 Hektar	2 Hektar	2 Hektar	2 Hektar				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	2 Hektar	2 Hektar	2 Hektar	2 Hektar	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)				
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ternak Ruminansia	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)	100,00	4 Laporan (Kabupaten)	4 Laporan (Kabupaten)	100,00
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)	1 Komoditi (Sapi Potong)				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02.1.07. 01	Pengadaan Benih Bibit Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Komoditas Pernakan (Sapi, Kambing dan Ayam Buras)	3 Komoditas Pernakan (Sapi, Kambing dan Ayam Buras)	3 Komoditas Pernakan (Sapi, Kambing dan Ayam Buras)	3 Komoditas Pernakan (Sapi, Kambing dan Ayam Buras)	100,00	9 Laporan (Kabupaten/Kota)	9 Laporan (Kabupaten/Kota)	100,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)	100%	100%	100%	100%				
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian								
3.27.03.1.01. 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						100,00			100,00
3.27.03.1.01. 02	Pengendalian dan Pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tanaman Pangan:2 Unit, Hortikultura :7 Unit, Pernakan: 1 Unit, Perkebunan: 7 Unit	Tanaman Pangan:2 Unit, Hortikultura :7 Unit, Pernakan: 1 Unit, Perkebunan: 7 Unit	Tanaman Pangan:2 Unit, Hortikultura :7 Unit, Pernakan: 1 Unit, Perkebunan: 7 Unit	Tanaman Pangan:2 Unit, Hortikultura :7 Unit, Pernakan: 1 Unit, Perkebunan: 7 Unit	100,00	3 Laporan (Komoditi)	3 Laporan (Komoditi)	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	14 Lokasi	14 Lokasi	14 Lokasi	14 Lokasi	100,00	5 Laporan (Kabupaten)	5 Laporan (Kabupaten)	100,00
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Koordinasi, Konsultasi dan Monev Kegiatan Rehabilitasi Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, dan Dipelihara	4 Lokasi Penerima DAK Tahun 2021	4 Lokasi Penerima DAK Tahun 2021	4 Lokasi Penerima DAK Tahun 2021	4 Lokasi Penerima DAK Tahun 2021	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TERKENDALINYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100%	100%	100%	100%				
3.27.04.1.01	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%				
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100%	100%	100%	100%	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.04.1.0 2	Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Sapi Potong & Kambing	Sapi Potong & Kambing	Sapi Potong & Kambing	Sapi Potong & Kambing				
3.27.04.1.02. 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Sapi Potong & Kambing	Sapi Potong & Kambing	Sapi Potong & Kambing	Sapi Potong & Kambing	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.04.1.0 3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Produk Olahan Hasil Pternaka n	Produk Olahan Hasil Pternaka n	Produk Olahan Hasil Pternaka n	Produk Olahan Hasil Pternaka n				
3.27.04.1.03. 02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Laporan Pengadaan Alat Pengolahan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Produk Olahan Hasil Pternakan	Produk Olahan Hasil Pternakan	Produk Olahan Hasil Pternakan	Produk Olahan Hasil Pternakan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PEMENUHAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian Provinsi	100%	100%	100%	100%				
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	100,00	50 Ha	50 Ha	100,00
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PEMENUHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
3.27.06.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	100%	100%	100%	100%				
3.27.06.1.01.02	Penilaian dan Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	4 Komoditi (Pternakan , Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	4 Komoditi (Pternakan , Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	4 Komoditi (Pternakan , Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	4 Komoditi (Pternakan , Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	4 Komoditi (Pternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	4 Komoditi (Pternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	4 Komoditi (Pternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	4 Komoditi (Pternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura)	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian (%)								
3.27.7.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	100%	100%	100%	100%				
3.27.7.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100,00	30 Orang	30 Orang	100,00
3.27.7.1.01.02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00	50 Orang	50 Orang	100,00
3.27.7.1.02	Pengembangan Penyerapan Penyuluh Pertanian	Mengembangkan Penyerapan Penyuluh Pertanian	100%	100%	100%	100%				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.7.1.02.0 1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.27.7.1.02.0 2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	22 Kelompok Tani	22 Kelompok Tani	22 Kelompok Tani	22 Kelompok Tani	100,00	22 Kelompok	22 Kelompok	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1. Analisis Capaian Sasaran Pertama : Menurunnya Tingkat Kemiskinan Petani

Menurunnya tingkat kemiskinan petani dalam bidang pertanian ditandai dengan beberapa indikator utama yaitu : Nilai Tukar Petani dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB. Capaian sasaran pertama seperti termuat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama

Sasaran 1	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Capaian (%)	Ket.
Menurunnya tingkat kemiskinan petani	Nilai Tukar Petani (poin)	102,3	102,59	99,71	Belum Tercapai
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	10,43	10,44	100,09	Tercapai

Indikator kinerja pada sasaran pertama merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Analisis pencapaian indikator kinerja dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indeks yang diperoleh dari perbandingan harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam presentase). Merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari harga produk pertanian dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk kebutuhan biaya produksi. Dengan demikian semakin tinggi nilai Nilai Tukar Petani, secara relatif semakin kuat pula tingkat daya beli. Dari hasil perhitungan BPS Provinsi Maluku, NTP Tahun 2022 mencapai: 102,59 atau lebih rendah 2,29 dari target NTP tahun 2022 atau memperoleh capaian sebesar 102,3.

NTP Maluku selama tahun 2022 lebih tinggi 1,45 poin dibandingkan NTP 2021 (101,14) pada periode yang sama. Sepanjang tahun 2022, NTP tertinggi dialami oleh petani pada subsektor hortikultura yaitu sebesar 105,49 dan terendah dialami oleh petani pada subsektor tanaman pangan, yakni sebesar 94,04.

2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2022 melebihi target dengan persentase capaian sebesar 100,09% dibandingkan angka target. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan produksi pada komoditas tanaman pangan yaitu pada kelompok tanaman tanaman jagung, kacang-kacangan. Sedangkan pada tanaman hortikultura sebagai sumber makanan terjadi peningkatan pada tanaman buahan dan tanaman sayuran khususnya sayuran dataran rendah dan komoditi cabai.

2.2.2. Analisis Capaian Sasaran Kedua : Meningkatnya Produksi Pertanian

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang merupakan salah satu isu yang penting dalam pembangunan pertanian di Provinsi Maluku. Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Kinerja terhadap Target Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

Sasaran 2	Indikator Kinerja	Target 2022 (ton)	Realisasi 2022 (ton)	Capaian (%)	Keterangan
Meningkatnya produksi komoditas pertanian sumber pangan dan komoditas unggulan	Produksi Komoditas Tanaman Pangan				
	Padi	121.768	92.600	76	Belum tercapai
	Jagung	19,5	31,4	160,9	Tercapai
	Kedelai	3,4	13	381,2	Tercapai
	Produksi Komoditas Hortikultura				
	Cabai	5.010,14	10.142,7	202,44	Tercapai
	Bawang merah	746,71	759,34	101,69	Tercapai
	Produksi Komoditas Peternakan				
	Daging sapi	3.550	4.371,25	123,13	Tercapai
	Telur	4.513	6.442,63	142,76	Tercapai
	Produksi Komoditas Perkebunan				
	Pala	5.862	5.914,06	100,89	Tercapai
	Cengkeh	21.605	21.964,71	101,66	Tercapai
	Kelapa	108.447	109.032	100,54	Tercapai

Capaian kinerja sasaran 2 : Meningkatnya produksi pertanian dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Produksi Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan yaitu komoditas pangan strategis nasional yang terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Produksi padi tahun 2022 mencapai 92.600 ton Gabah Kering Giling (GKG). Jika dibandingkan dengan target produksi dalam Rencana Strategis, produksi padi masih dibawah dari target tahun 2022 (121.768 ton) yaitu capaian sebesar 76%. Produksi padi di Provinsi Maluku mengalami penurunan sebanyak 24.200 ton GKG (20,72 %) dibandingkan 2021 yang sebesar 116.800 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2022 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 18.250 ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu sekitar 2.320 ton GKG. Penurunan luas panen di tahun 2022

(23.990 Ha) dibandingkan tahun 2021 menyebabkan ikut turunnya produksi padi. Namun turunnya produksi padi utamanya disebabkan oleh turunnya luas tanam di Kabupaten Buru dan Maluku Tengah karena beberapa desa tidak melakukan penanaman akibat adanya perbaikan saluran irigasi. Selain itu faktor Dampak Perubahan Iklim dan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terutama di Kabupaten Maluku Tengah turut mempengaruhi produksi padi.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang tahun 2022 setara dengan 51.860 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 13.550 ton (20,72 %) dibandingkan 2021 yang sebesar 65.410 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan beras di Provinsi Maluku tahun 2022 sebesar 140.776,8 ton, maka kurang lebih defisit sebesar 88.916 ton didatangkan dari luar daerah Maluku. Terkait dengan peningkatan produksi pangan ke depan, maka beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain :

- Tingkat kehilangan hasil padi masih cukup tinggi akibat panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan.
- Diperlukan strategi khusus untuk memacu petani agar dapat meningkatkan produksi pangan.
- Lahan yang belum memiliki irigasi sebaiknya tidak dibiarkan kosong tetapi digunakan untuk menanam padi lahan kering.
- Perlu adanya konsistensi antara perencanaan dan realisasi cetak sawah.
- Berdasarkan hasil penelitian Kapasitas Tukar Kation di Lahan sawah Maluku umumnya rendah sehingga dibutuhkan upaya pemupukan baik organik maupun anorganik.

Produksi tanaman jagung di tahun 2022 terealisasi sebesar 31,4 ton atau 160,9% dari target (19,5 ton). Sedangkan produksi kedelai di tahun 2022 mencapai 13 ton atau 381,2% dari target yang ditetapkan. Hal ini merupakan dampak dari program nasional yang turut menunjang meningkatnya luas panen jagung di Maluku, meskipun pola pemeliharaan yang belum intensif serta bergesernya musim tanam akibat pengaruh iklim juga turut mempengaruhi tingginya angka produksi.

Peningkatan produksi jagung dan kedelai di tahun 2022 juga tak lepas dari usaha pengembangan dua komoditi ini di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku. Pengembangan jagung seluas 6.000 Ha terbagi di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, Maluku Barat Daya dan kota Tual. Sedangkan pengembangan kedelai seluas 4.750 Ha terbagi di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Seram Bagian Timur.

2. Produksi Komoditas Hortikultura

Komoditas unggulan hortikultura terdiri dari bawang merah dan cabai. Keduanya merupakan komoditi penyumbang inflasi tertinggi dari sektor pertanian. Produksi cabai di tahun 2022 mencapai 10.141,7 ton melebihi target 5.010,14 atau sebesar 202,44%. Komoditi bawang merah mencapai produksi 759,34 ton lebih tinggi dari

target sebesar 746,71 ton (101,69%). Bila dibandingkan dengan tahun 2021, produksi cabai naik 2.487,7 ton atau 32,49% sedangkan komoditi bawang merah mengalami penurunan sebesar 253,2 ton atau 25,01%.

3. Produksi Komoditas Peternakan

Produksi komoditas peternakan yang menjadi indikator pengukuran kinerja adalah produksi daging sapi dan telur. Sesuai data pada tahun 2022 produksi daging sapi mencapai 4.371,25 ton melebihi target 3.550 ton atau sebesar 123,13% dan capaian produksi telur sebanyak 6.442,63 ton melebihi target sebesar 4.513 ton atau 142,76%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, produksi daging sapi di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 125,14% demikian juga dengan telur meningkat sebesar 162,2%.

Beberapa permasalahan pengembangan Sapi Potong di Maluku

- Tingginya pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Maluku ke provinsi tetangga
- Jumlah pemotongan ternak di Rumah Potong Resmi belum terdata dengan baik
- Masih tingginya prevalensi penyakit brucellosis (keguguran)
- Belum optimalnya penerapan inseminasi buatan (IB)
- Tingginya pemotongan ternak betina produktif
- Terbatasnya tenaga medis peternakan

4. Produksi Komoditas Perkebunan

Tiga komoditi utama sektor perkebunan di Maluku adalah pala, cengkeh dan kelapa. Produksi pala di tahun 2022 sebesar 5.914,06 ton atau 100,89% tercapai dari target sebesar 5.862 ton. Produksi cengkeh di tahun 2022 mencapai 21.964,71 ton atau 101,66% melebihi dari angka target sebesar 21.605 ton dan produksi kelapa sebesar 109.032 ton atau 100,54% melebihi dari target 108.447 ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, produksi pala mengalami kenaikan 2,92% dari 5.746 ton, produksi cengkeh naik 3,39% dari 21.244 ton dan produksi kelapa juga mengalami kenaikan sebesar 2,25% dari 106.634 ton. Realisasi produksi komoditi perkebunan melebihi target yang telah ditentukan, menunjukkan kinerja perkebunan yang cukup baik. Peningkatan produksi perkebunan di tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya kegiatan peremajaan tanaman perkebunan, adanya bantuan pemerintah yang menambah antusiasme petani juga adanya penambahan luas tanam baru.

2.2.3. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pembangunan

Pertanggungjawaban anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku selama tahun 2022 baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, disampaikan berupa Laporan

Kuangan yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2022 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

Adapun garis besar laporan realisasi anggaran tahun 2022 yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai Rp 236.500.000,- atau 111,29 % dari target sebesar Rp 212.500.000,-. Pendapatan berasal Dinas (Rp 35.000.000,-) dan 6 UPT Dinas Pertanian Maluku (177.500.000,-).
- b. Anggaran APBD Tahun 2022 mencapai Rp 83.754.493.884,- dengan realisasi sebesar Rp 79.368.832.285,- (94,76 %), terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terinci sebagai berikut :
 - b.1. Belanja tidak langsung APBD tahun 2022 sebesar Rp 33.525.920.485,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp 31.644.498.258,- (94,39%). Anggaran ini digunakan untuk pembayaran Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja Daerah.
 - b.2. Belanja langsung APBD tahun 2022 sebesar Rp 50.228.573.399,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.724.334.027 atau 95,01%.

2.2.3.1. Realisasi Anggaran dan Kegiatan APBD Tahun 2022

Tabel 2.3. Realisasi Keuangan APBD 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Kegiatan		SKPD Penanggung g Jawab
			Keuangan		
		Rp	Rp	%	
	TOTAL	83.754.493.884	79368.832.285	94,76	
	Belanja Tidak Langsung	33.525.920.485	31.644.498.258	94,39	
	Belanja Langsung	50.228.573.399	47.724.334.027	95,01	Distan Promal
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.466.461.724	9.117.106.330	96,31	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.217.663.920	1.189.264.063	97,67	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	788.280.400	784.987.167	99,58	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	134.948.800	130.798.800	96,92	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.437.000	169.965.446	93,16	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.997.720	63.512.650	88,21	BPSBBPP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.700.000	28.700.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	8.700.000	8.700.000	100,00	Benih Padi

	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.500.000	95.210.000	90,25	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.900.000	99,00	
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	70.900.000	60.710.000	85,63	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	100,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.996.960	167.070.826	92,31	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	99.999.291	92.956.176	92,96	
	Koordinas dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	39.999.646	38.606.750	96,52	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	34.998.023	34.007.900	97,17	
	Koordinas dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.000.000	1.500.000	25,00	Benih Padi
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.811.884.552	1.707.945.128	94,26	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.543.060	68.524.400	99,97	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298.262.000	292.675.000	98,13	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.997.500	74.975.000	99,97	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.670.000	84.670.000	100,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.996.000	9.906.000	99,10	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.886.000	165.114.966	72,46	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.999.250	15.744.000	98,40	BDP
	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	15.970.680	15.970.000	100,00	BDP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.598.390	32.594.700	99,99	BDP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.999.910	12.999.650	100,00	BDP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.904.000	73.931.800	96,14	BDP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.328.800	2.328.500	99,99	BPSBBPP
	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	4.370.000	4.369.300	99,98	BPSBBPP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.497.858	7.496.000	99,98	BPSBBPP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.916.790	4.845.250	81,89	BPSBBPP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.940.000	2.609.300	52,82	BPSBBPP
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.260.000	4.260.000	100,00	BPSBBPP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.756.000	48.551.542	93,81	BPSBBPP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.064.700	10.064.000	99,99	BPTPHP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.295.495	19.295.000	100,00	BPTPHP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	100,00	BPTPHP
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.491.000	7.490.000	99,99	BPTPHP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.459.820	4.459.820	100,00	Keswan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.541.650	16.541.650	100,00	Keswan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.125.000	4.125.000	100,00	Keswan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.480.000	6.480.000	100,00	Keswan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.566.520	120.708.300	96,13	Keswan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.061.860	2.061.860	100,00	Benih Padi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.561.300	22.561.300	100,00	Benih Padi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.550.000	7.550.000	100,00	Benih Padi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.999.900	9.999.900	100,00	Benih Padi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.682.650	6.682.650	100,00	Benih Padi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.992.000	2.992.000	100,00	Benih Padi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.690.000	74.490.000	91,19	Benih Padi

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.739.800	16.739.600	100,00	SPMA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.970.119	70.969.920	100,00	SPMA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.502.500	13.502.500	100,00	SPMA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.150.000	21.150.000	100,00	SPMA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.064.000	338.516.220	96,15	SPMA
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	793.890.840	784.077.940	98,76	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.650.000	113.480.000	94,06	BPTPHP
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.301.140	29.301.140	100,00	Keswan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.422.500	127.108.500	98,98	Benih Padi
	Pengadaan Mebel	142.800.000	141.848.700	99,33	SPMA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.500.000	249.122.400	99,85	SPMA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.217.200	123.217.200	100,00	SPMA
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.636.409.220	3.497.731.460	96,19	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.992.000	9.990.000	99,98	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.500.000	162.911.759	96,11	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	74.715.500	99,62	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	936.275.520	922.035.520	98,48	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.993.200	1.990.000	99,84	BDP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.904.800	114.884.444	90,53	BDP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.600.000	93.600.000	100,00	BDP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.818.000	1.818.000	100,00	BPSBBPP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000	59.215.469	94,90	BPSBBPP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.992.000	124.992.000	100,00	BPSBBPP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	BPTPHP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	43.113.245	89,82	BPTPHP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716.827.200	716.827.000	100,00	BPTPHP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	100,00	Keswan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.200.000	69.610.499	99,16	Keswan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	Benih Padi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.920.000	12.576.540	79,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.600.000	93.600.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.810.000	5.757.000	44,94	SPMA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.650.000	128.923.778	60,91	SPMA
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.973.300	47.969.570	99,99	SPMA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	808.453.200	804.701.136	99,54	SPMA
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.691.416.232	1.647.106.913	97,38	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.998.800	74.892.400	88,11	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	942.694.500	938.985.000	99,61	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.995.542	24.995.000	100,00	BDP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.231.000	33.231.000	100,00	BDP
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.962.520	24.962.000	100,00	BDP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.992.400	9.956.000	99,64	BDP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.896.400	44.896.250	100,00	BPSBBPP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000	9.949.300	99,99	BPSBBPP

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.949.700	28.940.000	99,97	BPSBBPP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.992.400	66.712.256	95,31	BPTPHP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.750.000	7.750.000	100,00	BPTPHP
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.969.770	49.969.000	100,00	BPTPHP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.969.000	7.969.000	100,00	BPTPHP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.708.000	21.236.328	97,83	Keswan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.660.000	3.200.000	87,43	Keswan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.690.000	2.650.000	98,51	Keswan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	10.000.000	100,00	Benih Padi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00	Benih Padi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.200.000	44.415.549	90,28	SPMA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.270.000	50.195.000	70,43	SPMA
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.605.000	59.383.000	99,63	SPMA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.931.200	129.819.830	99,91	SPMA
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.277.922.940	3.095.654.793	94,44	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.277.922.940	3.095.654.793	94,44	SPMA
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	280.000.000	251.780.000	89,92	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	495.000.000	494.472.000	99,89	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	140.500.000	139.700.000	99,43	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	1.800.000.000	1.687.190.000	93,73	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	562.422.940	522.512.793	92,90	
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	25.483.097.692	24.344.273.584	95,53	
1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	249.969.900	249.424.400	99,78	
	Pengawasan, Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	249.969.900	249.424.400	99,78	
2	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	11.610.971.515	11.024.552.284	94,95	
	Pengelolaan Penertiban Sertifikasi Benih	84.982.100	79.222.100	93,22	
	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	3.017.067.418	2.657.090.602	88,07	
	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.159.667.500	1.121.554.000	96,71	
	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	6.650.838.132	6.499.911.182	97,73	
	Pengelolaan Penertiban Sertifikasi Benih	87.579.570	78.993.100	90,20	
	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	35.902.784	31.167.500	86,81	
	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	53.997.911	48.625.700	90,05	
	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	358.311.500	345.363.500	96,39	
	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	162.624.600	162.624.600	100,00	
3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organik	130.664.656	122.910.300	94,07	
	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	55.682.856	49.188.500	88,34	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem	74.981.800	73.721.800	98,32	

	Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				
4	Peningkatam Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.250.899.000	5.837.727.200	93,39	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.250.899.000	5.837.727.200	93,39	
5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	461.137.933	450.073.500	97,60	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	370.386.000	368.164.500	99,40	Keswan
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	90.751.933	81.909.000	90,26	BPSBBPP
6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6.779.454.688	6.659.585.900	98,23	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6.779.454.688	6.659.585.900	98,23	
IV	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.111.868.537	8.425.168.890	92,46	
1	Penataan Prasarana Pertanian	9.111.868.537	8.425.168.890	92,46	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2.835.507.020	2.641.904.100	93,17	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Perencanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	6.147.478.227	5.664.887.200	92,15	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	128.883.290	118.377.590	91,85	
V	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	391.330.285	371.847.080	95,02	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	191.379.285	173.986.580	90,91	
	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	99.999.485	83.451.280	83,45	
	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	91.379.800	90.535.300	99,08	Keswan
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	100.085.000	98.000.600	97,92	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	100.085.000	98.000.600	97,92	
3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	99.866.000	99.859.900	99,99	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	99.866.000	99.859.900	99,99	
VI	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	378.959.600	358.534.120	94,61	
1	Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Pertanian Provinsi	378.959.600	358.534.120	94,61	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	99.983.600	98.412.800	98,43	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	278.976.000	260.121.320	93,24	
VII	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	129.400.000	116.160.000	89,77	
1	Penertiban Izin Usaha Pertanian yang	129.400.000	116.160.000	89,77	

	Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	39.340.000	32.690.000	83,10	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	90.060.000	83.470.000	92,68	
VIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.989.532.621	1.895.589.230	95,28	
1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	595.245.120	552.612.000	92,84	
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	74.999.680	63.911.200	85,22	
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	84.999.740	74.978.400	88,21	
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	129.345.700	127.145.700	98,30	BDP
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	60.900.000	56.370.000	92,56	BDP
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	245.000.000	230.206.700	93,96	SPMA
2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.394.287.501	1.342.977.230	96,32	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	199.397.411	199.447.230	100,02	
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	819.193.090	790.446.300	96,49	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	375.697.000	353.083.700	93,98	BDP

Pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Tahun Anggaran 2022 yang didanai oleh APBD terdiri dari 8 Program dan 23 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa layanan dan sarana administrasi yang memadai dan layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor serta peningkatan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.217.663.920,- dan terealisasi sebesar Rp 1.189.264.063,- atau 97,67% dan sisa anggaran Rp 28.399857,-. Kegiatan ini tercakup didalamnya adalah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dokumen RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 28.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 28.700.000,- atau 100%. Kegiatan ini tercakup didalamnya adalah koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD, laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 105.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 95.210.000,- atau 90,25% dan sisa anggaran Rp 10.290.000,-. Kegiatan ini tercakup didalamnya adalah koordinasi dan penilaian barang milik daerah (BMD) SKPD, pembinaan pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD dan penatausahaan BMD SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 180.996.960,- dan terealisasi sebesar Rp 167.070.826,- atau 92,31% dan sisa anggaran Rp 13.926.134,-. Kegiatan ini tercakup didalamnya adalah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.811.884.552,- dan terealisasi sebesar Rp 1.707.945.128,- atau 94,26% dan sisa anggaran Rp 103.939.424,-. Kegiatan ini tercakup didalamnya adalah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 793.890.840,- dan terealisasi sebesar Rp 784.077.940,- atau 98,76% dan sisa anggaran Rp 9.812.900. Kegiatan ini tercakup didalamnya adalah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan mesin lainnya, mebel, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.636.409.220,- dan terealisasi sebesar Rp 3.497.731.460,- atau 96,19% dan sisa anggaran Rp 138.677.760,-. Kegiatan ini tercakup didalamnya adalah penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.691.416.232,- dan terealisasi sebesar Rp 1.647.106.913,- atau 97,38% dan sisa anggaran Rp 44.309.319,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini bertujuan dalam merencanakan, mengorganisasikan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Maluku sebagai UPTD penanggung jawab program ini. Hanya terdapat satu kegiatan yang diimplementasikan dalam program ini yaitu :

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.277.922.940,- dan terealisasi sebesar Rp 3.095.654.793,- atau 94,44% dan sisa anggaran Rp 182.268.147,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya adalah pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pengadaan perlengkapan peserta didik, penyediaan biaya personil peserta didik, pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruang sekolah serta penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan dalam pengawasan peredaran sarana pertanian, mutu penyediaan dan peredaran benih pertanian yang bersertifikat. Tersedia anggaran sebesar Rp 25.483.097.692,- untuk program ini dan terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 24.344.273.584,- (95,53%). Kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan dalam program ini yaitu :

a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 249.969.900,- dan terealisasi sebesar Rp 249.424.000,- atau 99,78% dan sisa anggaran Rp 545.500,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya adalah pengawasan, sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian.

b. Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 11.610.971.515,- dan terealisasi sebesar Rp 11.024.552.284,- atau 94,95% dan sisa anggaran Rp 586.419.231,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya adalah pengelolaan penertiban sertifikasi benih; pengawasan mutu, penyedia dan peredaran benih/bibit hortikultura; pengawasan mutu, penyedia dan peredaran benih/bibit tanaman pangan; pengawasan mutu, penyedia dan peredaran benih/bibit perkebunan.

c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organik

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 130.664.656,- dan terealisasi sebesar Rp 122.910.300,- atau 94,07% dan sisa anggaran Rp 7.754.356,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya adalah penilaian kultivar SDG tumbuhan dan

mikroorganisme; dan pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme.

d. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.250.899.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.837.727.200,- atau 93,39% dan sisa anggaran Rp 413.171.800,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya adalah pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan serta pakan kewenangan provinsi.

e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 461.137.933,- dan terealisasi sebesar Rp 450.073.500,- atau 97,6% dan sisa anggaran Rp 11.064.433,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya adalah pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak.

f. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.779.454.688,- dan terealisasi sebesar Rp 6.659.585.900,- atau 98,23% dan sisa anggaran Rp 119.868.788,-. Kegiatan ini tercakup di dalamnya adalah pengadaan benih/bibit ternak sumbernya dari daerah provinsi lain.

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan dalam menyediakan prasarana untuk peningkatan nilai tambah komoditas pertanian. Terdapat satu kegiatan di dalamnya yaitu

a. Penataan Prasarana Pertanian

Tersedia anggaran sebesar Rp 9.111.868.537,- untuk kegiatan ini dan terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 8.425.168.890,- (92,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp 686.699.647,-. Kegiatan penataan prasarana pertanian terdiri dari sub kegiatan Pengendaliandan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian; Koordinasi, Sinkronisasi Dan Perencanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.

5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis serta pengawasan peredaran ternak dan pembinaan penerapan sertifikasi usaha produk hewan. Tersedia anggaran sebesar Rp 391.330.285,- dan

telah terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 371.847 080,- (95,02%) dan sisa anggaran Rp 19.483.205,-. Kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah :

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 191.379.285,- dan terealisasi sebesar Rp 173.986.580,- atau 90,91% dan sisa anggaran Rp 17.392.705,-. Tercakup di dalamnya sub kegiatan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; dan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.

b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.085.000,- dan terealisasi sebesar Rp 98.000.600,- atau 97,92% dan sisa anggaran Rp 2.084.400,-. Tercakup di dalamnya sub kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.

c. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

Teralokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 99.866.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.859.900,- atau 99,99% dan sisa anggaran Rp 6.100,-. Tercakup di dalamnya sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan.

6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan dalam pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Tersedia anggaran sebesar Rp 378.959.600,- dan telah terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 358.534.120,- (94,61%) dan sisa anggaran Rp 20.425.480,-. Terdapat satu kegiatan dalam program ini yaitu :

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Tersedia anggaran sebesar Rp 378.959.600,- dan telah terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 358.534.120,- (94,61%) dan sisa anggaran Rp 20.425.480,-. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas dan UPTD BPTPHP.

7. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan dalam penertiban izin usaha pertanian. Terdapat satu kegiatan dalam program ini yaitu :

a. Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tersedia anggaran sebesar Rp 129.400.000,- dan telah terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 116.160.000,- (89,77%) dan sisa anggaran Rp 13.240.000,-. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Lintas Kabupaten/Kota; dan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

8. Program Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian bertujuan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia pertanian. Tersedia anggaran sebesar Rp 1.989.532.621,- untuk program ini dan terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 1.895.589.230,- (95,28%) dan sisa anggaran Rp 93.943.391,-. Terdapat dua kegiatan dalam program ini yaitu :

a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Tersedia anggaran sebesar Rp 595.245.120,- dan telah terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 552.612.000,- (92,84%) dan terdapat sisa anggaran Rp 42.633.120,-. Dalam kegiatan ini dilaksanakan sub-sub kegiatan yaitu: Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta; Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.

b. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Tersedia anggaran sebesar Rp 1.394.287.501,- dan telah terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp 1.342.977.230,- (96,32%) dan terdapat sisa anggaran Rp 51.310.271,-. Dalam kegiatan ini dilaksanakan sub-sub kegiatan yaitu: Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

2.2.3.2. Realisasi Anggaran dan Kegiatan APBN Tahun 2022

Alokasi anggaran belanja yang dibiayai dana APBN tahun 2022 yang terdiri dari dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebesar Rp 42.811.509.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai Rp 42.376.900.851,- (98,98%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp 434.608.149,-.

Tabel 2.4. Realisasi Keuangan APBN 2022

No	Kode Program	DIPA/PROGRAM/UNIT ORGANISASI SUMBER DANA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Sisa Anggaran
				Keuangan	

				Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
		J U M L A H	42.811.509.000	42.376.900.851	98,98	434.608.149
1	219055. HA (DK)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.006.920.000	2.006.820.000	100,00	100.000
	219055.4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	756.570.000	756.570.000	100,00	0
	219055.4580	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	1.250.350.000	1.250.250.000	99,99	100.000
	219055 WA	Program Dukungan Manajemen	52.909.000	52.909.000	100,00	0
	219055.1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	52.909.000	52.909.000	100,00	0
2	219090. EC (TP)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.623.960.000	4.556.319.000	98,54	67.641.000
	219090.5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	4.623.960.000	4.556.319.000	98,54	67.641.000
	219090. HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.504.120.000	2.384.597.250	95,23	119.522.750
	219090.1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman pangan	1.657.120.000	1.542.097.250	93,06	115.022.750
	219090.4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	847.000.000	842.500.000	99,47	4.500.000
	219090 WA	Program Dukungan Manajemen	768.938.000	765.882.000	99,60	3.056.000
	219090.1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	768.938.000	765.882.000	99,60	3.056.000
3	219000. EC (DK)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	88.266.000	88.263.000	100,00	3.000
	219000.5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	88.266.000	88.263.000	100,00	3.000
	219000. HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.019.700.000	2.006.660.100	99,35	13.039.900
	219000.1773	Perlindungan Hortikultura	595.000.000	591.420.000	99,40	3.580.000
	219000.4581	Perbenihan Hortikultura	1.424.700.000	1.415.240.100	99,34	9.459.900
	219000. WA	Program Dukungan Manajemen	559.000.000	559.000.000	100,00	0
	219000.1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	559.000.000	559.000.000	100,00	0
4	219091 EC (TP)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.022.624.000	1.021.420.617	99,88	1.203.383
	219091.5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.022.624.000	1.021.420.617	99,88	1.203.383
	219091 HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.670.000.000	1.666.964.000	99,82	3.036.000
	219091.1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1.670.000.000	1.666.964.000	99,82	3.036.000
	219091 WA	Program Dukungan Manajemen	160.000.000	160.000.000	100,00	0
	219091.1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura	160.000.000	160.000.000	100,00	0
5	219001 EC (DK)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	43.600.000	43.600.000	100,00	0
	219001.1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	43.600.000	43.600.000	100,00	0
	219001 WA	Program Dukungan Manajemen	755.222.000	755.222.000	100,00	0
	219001.1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	755.222.000	755.222.000	100,00	0
6	219092 EC (TP)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.425.614.000	4.238.323.284	95,77	187.290.716
	219092.1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	855.000.000	820.340.000	95,95	34.660.000
	219092.5888	Pengembangan Kawasan Tanaman	1.218.400.000	1.191.070.250	97,76	27.329.750

		Semusim dan Rempah				
	219092.5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1.604.475.000	1.511.670.000	94,22	92.805.000
	219092.5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	747.739.000	715.243.034	95,65	32.495.966
	219092 WA	Program Dukungan Manajemen	501.615.000	501.615.000	100,00	0
	219092.1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	501.615.000	501.615.000	100,00	0
7	219093 EC (TP)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	15.000.000	15.000.000	100,00	0
	219002.5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	15.000.000	15.000.000	100,00	0
	219093 HA	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.328.902.000	7.328.570.000	100,00	332.000
	219002.1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	557.015.000	556.703.000	99,94	312.000
	219002.1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	6.564.387.000	6.564.367.000	100,00	20.000
	219002.1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	207.500.000	207.500.000	100,00	0
	219002 WA	Program Dukungan Manajemen	692.628.000	692.628.000	100,00	0
	219002.1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	692.628.000	692.628.000	100,00	0
8	4034.58. DL (DK)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.603.127.000	4.596.358.600	99,85	6.768.400
	403458.1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	4.603.127.000	4.596.358.600	99,85	6.768.400
9	219004. HA (DK)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	627.199.000	610.899.000	97,40	16.300.000
	219004.1794	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	109.700.000	98.925.000	90,18	10.775.000
	219004.1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	396.699.000	391.174.000	98,61	5.525.000
	219004.3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	60.800.000	60.800.000	100,00	0
	219004.3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	60.000.000	60.000.000	100,00	0
	219004. WA	Program Dukungan Manajemen	369.190.000	367.190.000	99,46	2.000.000
	219004.1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	369.190.000	367.190.000	99,46	2.000.000
10	219095. HA (TP)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.117.225.000	7.102.910.000	99,80	14.315.000
	219095.1794	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	3.192.000.000	3.192.000.000	100,00	0
	219095.1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1.094.350.000	1.081.333.000	98,81	13.017.000
	219095.1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	150.000.000	150.000.000	100,00	0
	219095.3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	2.624.805.000	2.623.507.000	99,95	1.298.000
	219095.3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	56.070.000	56.070.000	100,00	0
	219095. WA	Program Dukungan Manajemen	855.750.000	855.750.000	100,00	0
	219004.1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	855.750.000	855.750.000	100,00	0

Pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Tahun Anggaran 2022 yang didanai oleh APBN terdiri dari dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Tanaman Pangan)

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada sub sektor tanaman pangan dibiayai oleh dana TP dan DK dengan total anggaran sebesar Rp 4.511.040.000,- terealisasi sebesar Rp 4.391.417.250,-; sisa anggaran Rp 119.622.750,-. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.603.570.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.599.070.000,-.

b. Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.250.350.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.250.250.000,- atau 99,99%; sisa anggaran Rp 100.000,-.

c. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.657.120.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.542.097.250.000,- atau 93,06%; sisa anggaran Rp 115.022.750,-.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Tanaman Pangan)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada sub sektor tanaman pangan dibiayai oleh dana TP dengan total anggaran sebesar Rp 4.623.960.000,- terealisasi sebesar Rp 4.556.319.000,- atau 98,54%; sisa anggaran Rp 67.641.000,-. Hanya satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu : **Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.**

3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Hortikultura)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada sub sektor hortikultura dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. Dalam program ini hanya ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yaitu : **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.110.890.000,- terealisasi sebesar Rp 1.109.683.617,- atau 99,82%; sisa anggaran Rp 1.203.383,-.

4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Hortikultura)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada sub sektor hortikultura dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.689.700.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp3.673.624.100,- (99,56%) dengan sisa anggaran Rp 16.075.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Perlindungan Hortikultura

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 595.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 591.420.000,- atau 99,4%; sisa anggaran Rp3.580.000,-.

b. Perbenihan Hortikultura

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.424.700.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.415.240.100,- atau 99,34%; sisa anggaran Rp 9.459.900,-.

c. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.670.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.666.964.000,- atau 99,82%; sisa anggaran Rp3.036.000,-.

5. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Perkebunan)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada sub sektor perkebunan dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp4.469.214.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 4.281.923.284,- (95,81%) dengan sisa anggaran Rp 187.290.716,-. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Penguatan Perlindungan Perkebunan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 43.600.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 43.600.000,- atau 100%.

b. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 855.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 820.340.000,- atau 95,95%; sisa anggaran Rp 9.459.900,-.

c. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.218.400.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.191.070.250,- atau 97,76%; sisa anggaran Rp 27.329.750,-.

d. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.604.475.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.511.670.000,- atau 94,22%; sisa anggaran Rp 92.805.000,-.

e. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 747.739.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 715.243.034,- atau 95,65%; sisa anggaran Rp 32.495.966,-.

6. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Pernakan dan Kesehatan Hewan)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada sub sektor peternakan dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan. Dalam program ini hanya ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yaitu : **Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp 15.000.000,- atau 100%,.

7. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Pernakan dan Kesehatan Hewan)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada sub sektor hortikultura dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.328.902.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 7.328.570.000,- (100%) dengan sisa anggaran Rp 332.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 557.015.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 556.703.000,- atau 99,94%; sisa anggaran Rp312.000,-.

b. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.564.387.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 6.564.387.000,- atau 100%; sisa anggaran Rp20.000,-.

c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 207.500.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 207.500.000,- atau 100%.

8. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (BPP-SDM Pertanian)

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dibiayai oleh dana DK. Dalam program ini hanya ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yaitu : **Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.603.127.000,- terealisasi sebesar Rp 4.596.358.600,- atau 99,85%,.

9. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PSP)

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dibiayai oleh dana TP dan DK. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.744.424.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 7.713.809.000,- (99,60%) dengan sisa anggaran Rp30.615.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.301.700.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 3.290.925.000,- atau 99,67%; sisa anggaran Rp10.775.000,-.

b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.491.049.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 1.472.507.000,- atau 98,75%; sisa anggaran Rp18.542.000,-.

c. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 2.685.605.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 2.684.307.000,- atau 99,95%; sisa anggaran Rp1.298.000,-.

d. Fasilitas Pembiayaan Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 116.070.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 116.070.000,- atau 100%;.

e. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawsan Alat Mesin Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 150.000.000,- atau 100%.

10. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dibiayai dana TP dan DK oleh semua sub sektor baik Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, BPP-SDM Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PSP. Total alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.715.252.000,- dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran mencapai Rp 4.710.196.000,- (99,89%).

2.3. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu pertanian di Provinsi Maluku mencakup aspek seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, akses petani terhadap permodalan, sistem perbenihan dan perbibitan, kelembagaan petani dan penyuluh, nilai tukar petani (NTP), keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian

Kondisi produktivitas komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Selain itu, sebagian besar produksi pertanian mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1° Celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

3. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

Kurangnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan Daerah aliran

Sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber- sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan. Pada sisi lain jalan usaha tani sebagai jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan masih sangat minim. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah pergdangan, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, Pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani baik untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih fungsi lahan serta status kepemilikan lahan

Alih fungsi lahan saat ini di Maluku belum terasa namun potensi ke arah ini sangat besar terkait dengan pertambahan jumlah penduduk maupun kebutuhan lahan untuk penggunaan lain baik dalam sektor pertanian sendiri maupun dari luar sektor pertanian. Dalam sektor pertanian pada beberapa tempat lahan pertanian pangan baik lahan sawah maupun lahan sagu di beberapa tempat telah dialih fungsikan misalnya untuk perkebunan swasta. Sedangkan dari luar sektor pertanian seperti permukiman, pertambangan dan perkantoran. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bias dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian

melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani di Maluku masih memiliki keterbatasan dalam mengakses serta menggunakan permodalan dari lembaga keuangan formal akibat tidak rela terbebani dengan persoalan kredit, tidak mau direpotkan dengan segala prosedur yang dihadapi dan atau tidak memiliki agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani, penyuluh dan petugas fungsional lapangan. Kondisi organisasi petani saat ini sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. Pada sisi lain perlu pula peningkatan peran penyuluh dan petugas fungsional lapangan seperti petugas pengamat OPT sehingga informasi dan penanganan secara dini dapat dilakukan.

6. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

Petani pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Meskipun hasil survei statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

7. Belum optimalnya kinerja aparat pertanian serta belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang profesional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah. Pembangunan sektor pertanian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih sering dilakukan.

8. Jumlah tenaga kerja bidang pertanian dan Perbaikan citra petani / pertanian agar kembali diminati generasi penerus

Kondisi pertanian di pedesaan saat ini menjadi kurang menarik bagi generasi muda untuk bekerja dan berusaha di sektor pertanian terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena belum berkembangnya agroindustri di pedesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi on-farm dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Pada jangka panjang kondisi ini akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja di bidang pertanian.

Tantangan ke depan adalah bagaimana memantapkan pengembangan agroindustri di pedesaan. Di samping itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsin tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

9. Daya saing produk pertanian pasar global

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerjasama regional (antar negara).

2.4. Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024.

Terlihat untuk program-program Dinas Pertanian Provinsi Maluku yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD sesuai dalam Tabel 2.5 (Tabel T-C.31).

Tabel 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3	Urusan Pilihan				53.267.081.932	3	Urusan Pilihan				40.075.381.000
3,27	PERTANIAN				53.267.081.932	3,27	PERTANIAN				40.075.381.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah (persen)			39.257.259.417	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah (persen)			7.586.800.000
3.27.01.01.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Ambon		1.175.382.000	3.27.01.01.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Ambon		2.001.824.000
3.27.01.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon & Luar Provinsi	3 Dokumen	825.382.000	3.27.01.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon & Luar Provinsi	3 Dokumen	1.076.174.000
3.27.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000	3.27.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	42.350.000
3.27.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000	3.27.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	42.350.000
3.27.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000	3.27.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	42.350.000
3.27.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000	3.27.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	42.350.000
3.27.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Kab/Kota & Luar Provinsi	1 Laporan	130.000.000	3.27.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Kab/Kota & Luar Provinsi	1 Laporan	423.500.000
3.27.01.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Kab/Kota & Luar Provinsi	1 Laporan	200.000.000	3.27.01.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Kab/Kota & Luar Provinsi	1 Laporan	332.750.000
3.27.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			35.020.594.687	3.27.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			60.500.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	176 Orang	34.913.614.687	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	176 Orang	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	98.580.000	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	30.250.000
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	8.400.000	3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	30.250.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			138.840.000	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			223.850.000
3.27.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	15.000.000	3.27.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	30.250.000
3.27.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	78.840.000	3.27.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	121.000.000
3.27.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	10.000.000	3.27.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	36.300.000
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	35.000.000	3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	36.300.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah			166.346.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah			333.500.000
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Ambon & Luar Provinsi	1 Dokumen	57.869.000	3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Ambon & Luar Provinsi	1 Dokumen	181.500.000
3.27.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Ambon & Luar Provinsi	1 Dokumen	61.867.000	3.27.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Ambon & Luar Provinsi	1 Dokumen	100.000.000
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Ambon	1 Dokumen	46.610.000	3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Ambon	1 Dokumen	52.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.27.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			746.9 49.650	3.27.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.612.0 76.000
3.27.01 .1.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	34.985 .350	3.27.0 1.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	181.500 .000
3.27.01 .1.06.0 2	Penyediaan Perlitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	340.42 5.000	3.27.0 1.1.06. 02	Penyediaan Perlitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	605.000 .000
3.27.01 .1.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	72.257 .400	3.27.0 1.1.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	164.226 .000
3.27.01 .1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Ambon	2 Paket	69.999 .900	3.27.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Ambon	2 Paket	151.250 .000
3.27.01 .1.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Ambon	1 Laporan	13.724 .000	3.27.0 1.1.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Ambon	1 Laporan	26.000 .000
3.27.01 .1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon dan Luar Provinsi	1 Laporan	215.55 8.000	3.27.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon dan Luar Provinsi	1 Laporan	484.100 .000
3.27.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			300.0 00.000	3.27.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200.0 00.000
3.27.01 .1.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bertambahnya Kendaraan Pendukung Operasional Dinas (Unit)	Kota Ambon	8 unit	300.00 0.000	3.27.0 1.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bertambahnya Kendaraan Pendukung Operasional Dinas (Unit)	Kota Ambon	8 unit	200.000 .000
3.27.0 1.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.440.1 59.080	3.27.0 1.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.483.5 00.000
3.27.01 .1.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	4 Laporan	9.988. 000	3.27.0 1.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	4 Laporan	25.000 .000
3.27.01 .1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Ambon	12 Laporan	221.81 5.992	3.27.0 1.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Ambon	12 Laporan	217.000 .000
3.27.01 .1.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	4 Laporan	37.750 .000	3.27.0 1.1.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	4 Laporan	181.500 .000
3.27.01 .1.08.0 4	Penyediaan jasa umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	12 Laporan	1.170.60 5.088	3.27.0 1.1.08. 04	Penyediaan jasa umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	12 Laporan	2.060.00 0.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.27.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			268.9 88.000	3.27.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			671.5 50.000
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Ambon	3 Unit	79.994.000	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Ambon	3 Unit	183.150.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Ambon	1 Unit	188.994.000	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Ambon	1 Unit	488.400.000
3.27.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)			7.644.3 55.949	3.27.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)			9.634.2 40.125
3.27.0 2.1.01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian			402.8 62.008	3.27.0 2.1.01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian			822.6 00.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Maluku Tengah dan Aru	2 Laporan	402.862.008	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Maluku Tengah dan Aru	2 Laporan	822.600.000
3.27.0 2.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3.836.4 99.025	3.27.0 2.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			4.076.7 90.125
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	3 Sertifikat	64.958.900	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	3 Sertifikat	305.250.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	11 Kabupaten/ kota	5 Laporan (Kabupate n)	1.674.999.920	3.27.02.1.02.02	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	11 Kabupate n/kota	5 Laporan (Kab)	1.674.999.920
3.27.02.1.02.03	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu,	11 Kabupaten/ kota	10 Laporan (Kab/ Kota)	599.998.650	3.27.02.1.02.03	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu,	11 Kabupate n/kota	10 Laporan (Kab/Kota)	599.998.650
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Perkebunan	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	11 Kabupaten/ kota	4 Laporan (Kabupate n)	1.496.541.555,0	3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Perkebunan	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	11 Kabupate n/kota	4 Laporan (Kab)	1.496.541.555,0

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.27.0 2.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			49.999.600	3.27.0 2.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			155.000.000
3.27.02 .1.03.0 4	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kota Ambon & Seram Bagian Timur	1 Laporan	49.999.600	3.27.0 2.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kota Ambon & Seram Bagian Timur	1 Laporan	155.000.000
3.27.0 2.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			2.199.999.916	3.27.0 2.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			544.500.000
3.27.02 .1.04.0 2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ternak Ruminansia	Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat & Seram Bagian Timur	4 Laporan (Kabupaten)	2.199.999.916	3.27.0 2.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ternak Ruminansia	Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat & Seram Bagian Timur	4 Laporan (Kab)	544.500.000
3.27.0 2.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain			1.154.995.400	3.27.0 2.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain			4.035.350.000
3.27.02 .1.07.0 1	Pengadaan Benih Bibit Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Maluku Tengah, Buru, SBB, SBT & Kota Tual	9 Laporan (Kabupaten/Kota)	1.154.995.400	3.27.0 2.1.07.01	Pengadaan Benih Bibit Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Maluku Tengah, Buru, SBB, SBT & Kota Tual	9 Laporan (Kabupaten/Kota)	4.035.350.000
3.27.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)			4.884.991.266	3.27.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)			10.591.900.000
3.27.0 3.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian			4.884.991.266	3.27.0 3.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian			10.591.900.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Maluku Tengah dan Buru			3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Maluku Tengah dan Buru		
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Buru, Malteng, SBT, Aru, Tual, Malra dan kota Ambon	3 Laporan (Komoditi)	739.99 9.200	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Buru, Malteng, SBT, Aru, Tual, Malra dan kota Ambon	3 Laporan (Komoditi)	3.424.30 0.000
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Kota Tual	5 Laporan (Kabupate n)	3.944.99 2.066	3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Kota Tual	5 Laporan (Kab)	6.986.10 0.000
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Koordinasi, Konsultasi dan Monev Kegiatan Rehabilitasi Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, dan Dipelihara	Buru Selatan, MBD, Kep.Tanimbar, Kep.Aru & Luar Provinsi	1 Laporan	200.00 0.000	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Koordinasi, Konsultasi dan Monev Kegiatan Rehabilitasi Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, dan Dipelihara	Buru Selatan, MBD, Kep.Tanimbar, Kep.Aru & Luar Provinsi	1 Laporan	181.500 .000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TERKENDALINYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			145.0 24.500	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TERKENDALINYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			442.5 00.000
3.27.04.1.01	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			59. 999.800	3.27.04.1.01	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			151.2 50.000
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Maluku Tengah, SBB, Kep.Tanimbar, MBD & Kota Ambon	1 Laporan	59.999 .800	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Maluku Tengah, SBB, Kep.Tanimbar, MBD & Kota Ambon	1 Laporan	151.250 .000
3.27.04.1.02	Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			47. 512.500	3.27.04.1.02	Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			151.2 50.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.27.04 .1.02.0 2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Ambon, Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru, Buru Selatan & Kota Tual	1 Laporan	47.512 .500	3.27.0 4.1.02. 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Ambon, Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru, Buru Selatan & Kota Tual	1 Laporan	151.250 .000
3.27.0 4.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			37. 512.200	3.27.0 4.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			140.0 00.000
3.27.04 .1.03.0 2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Laporan Pengadaan Alat Pengolahan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Kota Ambon & Maluku Tengah	1 Laporan	37.512 .200	3.27.0 4.1.03. 02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Laporan Pengadaan Alat Pengolahan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Kota Ambon & Maluku Tengah	1 Laporan	140.000 .000
3.27.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PEMENUHAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			208.9 99.900	3.27.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PEMENUHAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			250.0 00.000
3.27.0 5.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian Provinsi			208.9 99.900	3.27.0 5.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian Provinsi			250.0 00.000
3.27.05 .1.01.0 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Maluku Tengah & Seram Bagian Timur	50 Ha	208.99 9.900	3.27.0 5.1.01. 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Maluku Tengah & Seram Bagian Timur	50 Ha	250.000 .000
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PEMENUHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN			79. 940.000	3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PEMENUHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN			201.0 00.000
3.27.0 6.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			79. 940.000	3.27.0 6.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			201.0 00.000
3.27.06 .1.01.0 2	Penilaian dan Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	11 Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	39.970 .000	3.27.0 6.1.01. 02	Penilaian dan Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	11 Kabupate n/Kota	1 Dokumen	80.000 .000
3.27.06 .1.01.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	11 Kabupaten/ Kota	4 Laporan	39.970 .000	3.27.0 6.1.01. 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	11 Kabupate n/Kota	4 Laporan	121.000 .000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian (%)			1.046.5 10.900	3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian (%)			665.5 00.000
3.27.7.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			697.3 03.900	3.27.7.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			332.7 50.000
3.27.7.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	11 Kabupaten/ Kota	30 Orang	647.30 3.900	3.27.7.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	11 Kabupate n/Kota	30 Orang	151.250 .000
3.27.7.1.01.02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	11 Kabupaten/ Kota	50 Orang	50.000 .000	3.27.7.1.01.02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	11 Kabupate n/Kota	50 Orang	181.500 .000
3.27.7.1.02	Pengembangan Penyerapan Penyuluh Pertanian	Mengembangkan Penyerapan Penyuluh Pertanian			349.2 07.000	3.27.7.1.02	Pengembangan Penyerapan Penyuluh Pertanian	Mengembangkan Penyerapan Penyuluh Pertanian			332.7 50.000
3.27.7.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	11 Kabupaten/ Kota & Provinsi Sumbar	1 Dokumen	299.20 7.000	3.27.7.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	11 Kabupate n/Kota & Provinsi Sumbar	1 Dokumen	151.250 .000
3.27.7.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	11 Kabupaten/ Kota	22 Kelompok	50.000 .000	3.27.7.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	11 Kabupate n/Kota	22 Kelompok	181.500 .000
J U M L A H					53.267.081.93 2	J U M L A H					40.075.381.000

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi sektor pertanian merupakan upaya Dinas Pertanian dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategis yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku.

Program pembangunan pertanian merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Pertanian sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Penyampaian usulan program/kegiatan yang merupakan pokok pikiran DPRD secara tertulis disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan kemudian ditelaah oleh Perangkat Daerah guna ditindaklanjuti/direspon, apakah dapat diakomodir untuk dikerjakan tahun depan. Pokok-pokok Pikiran DPRD yang dapat diakomodir untuk dilaksanakan tahun depan akan diserap ke dalam Renja Perangkat Daerah bersamaan dengan input Renja pada sistem SIPD. Sedangkan penyampaian usulan-usulan program/kegiatan pembangunan yang berasal dari masyarakat disampaikan secara berjenjang pada tingkat kabupaten/kota, diinput melalui aplikasi perencanaan dan diverifikasi pada tingkat provinsi.

Adapun program-program sektor pertanian yang langsung berkaitan dan menjadi program pemerintah Provinsi Maluku dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Maluku

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian Provinsi Maluku melakukan hubungan kerja dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup sektor pertanian. Hubungan kerja ini didasari atas program dan kegiatan melalui Eselon 1 terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk mendukung Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 - 2024, yakni: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Di Provinsi Maluku, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku mengacu pada Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yang mana penyusunan Renstra pun mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yaitu “ **Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan** ”. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pertanian sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Gubernur dalam mencapai visi dan misi bidang pertanian. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pertanian. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian untuk periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian
- 3) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya produksi komoditas pertanian sumber pangan dan komoditas unggulan
- 2) Meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu pada kelompok tani
- 3) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani
- 4) Meningkatnya jumlah sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

Rumusan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal yang digali dari berbagai potensi, isu strategis dan permasalahan yang bersifat spesifik lokal. Maka kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku yang ditetapkan, walaupun bersifat otonom, namun masih bersifat integratif. Atas dasar konsepsi dimaksud maka penetapan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal Provinsi Maluku.

Penetapan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Provinsi Maluku masih mengacu pada Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024, sehingga ditetapkan tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran akan memperlihatkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus dan spesifik, terinci dan terukur.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2024 Dinas Pertanian Provinsi Maluku selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra dan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku 2019 - 2024 adalah :

- 1) Mendorong peningkatan ketersediaan pangan, nilai tambah dan daya saing komoditas hasil pertanian
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas SDM pertanian
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas Pertanian Provinsi Maluku maka sasaran Renja 2024 yaitu :

- 1) Meningkatnya produksi komoditas pertanian sumber pangan dan komoditas unggulan
- 2) Meningkatnya jumlah SDM pertanian yang berkualitas
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk mengukur kinerja sasaran pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, maka disusun indikator sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Indikator dan Sasaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	
					2023	2024
1. Mendorong peningkatan Ketersediaan Pangan, Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Hasil Pertanian	Pertumbuhan dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Komoditas pertanian sumber pangan dan komoditas unggulan	Produksi komoditas Pertanian			
			Daging	Ton	3.728	3.914
			Telur	Ton	4.649	4.788
			Padi	Ton	132.857	147.800
			Jagung	Ton	30	45
			Kedelai	Ton	25	50
			Pala	Ton	5.915	5.969
			Cengkeh	Ton	23.387	23.855
			Kelapa	Ton	110.770	112.986
			Volume Ekspor	Ton	100	100
			Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	10.49	12.57
			NTP	%	102,5	102,7
2. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sumberdaya Manusia Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	Meningkatnya Jumlah SDM Pertanian yang Berkualitas	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	52,7	65,8
			Jumlah kelompok tani yang menerapkan jaminan mutu	Kelompok	7	9

3.3.Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pembangunan pertanian pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2019-2024 mendukung tujuan dan sasaran yang lebih lanjut dijabarkan sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat. Sedangkan **program prioritas** Dinas Pertanian Maluku terdiri dari dua (2) program yaitu **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dan **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**. Selanjutnya program dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - 2) Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - 4) Peningkatam Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - 5) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
- III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - 1) Penataan Prasarana Pertanian
- IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 - 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
 - 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - 3) Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
- V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- 1) Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Pertanian Provinsi

VI. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- 1) Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pertanian Provinsi Maluku

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3	Urusan Pilihan				53.267.081.932,00			58.515.070.256,00
3,27	PERTANIAN				53.267.081.932			58.515.070.256
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah (persen)			39.257.259.417			43.149.765.357
3.27.01.1.01.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Ambon		1.175.382.000			1.292.920.200
3.27.01.1.01. 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon & Luar Provinsi	3 Dokumen	825.382.000		3 Dokumen	907.920.200
3.27.01.1.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	5.500.000
3.27.01.1.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	5.500.000
3.27.01.1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	5.500.000
3.27.01.1.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Ambon	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	5.500.000
3.27.01.1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Kab/Kota & Luar Provinsi	1 Laporan	130.000.000		1 Laporan	143.000.000
3.27.01.1.01. 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Kab/Kota & Luar Provinsi	1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	220.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3.27.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Pernagkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			35.020.594.6 87			38.522.654.15 5
3.27.01.1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	176 Orang	34.913.614.68 7		176 Orang	38.404.976.155
3.27.01.1.02. 05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	98.580.00 0		1 Laporan	108.438.000
3.27.01.1.02. 07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	8.400.00 0		1 Laporan	9.240.000
3.27.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			138.840.0 00			152.724.00 0
3.27.01.1.03. 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	15.000.00 0		1 Laporan	16.500.000
3.27.01.1.03. 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	78.840.00 0		1 Laporan	86.724.000
3.27.01.1.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon & Kab/Kota	1 Laporan	10.000.00 0		1 Laporan	11.000.000
3.27.01.1.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Ambon	1 Laporan	35.000.00 0		1 Laporan	38.500.000
3.27.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah			166.346.0 00			182.980.60 0
3.27.01.1.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Ambon & Luar Provinsi	1 Dokumen	57.869.00 0		1 Dokumen	63.655.900
3.27.01.1.05. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Ambon & Luar Provinsi	1 Dokumen	61.867.00 0		1 Dokumen	68.053.700

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Ambon	1 Dokumen	46.610.000		1 Dokumen	51.271.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			746.949.650			801.864.615
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	34.985.350		1 Paket	38.483.885
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	340.425.000		1 Paket	374.467.500
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	1 Paket	72.257.400		1 Paket	79.483.140
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Ambon	2 Paket	69.999.900		2 Paket	76.999.890
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Ambon	1 Laporan	13.724.000		1 Laporan	15.096.400
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon dan Luar Provinsi	1 Laporan	215.558.000		1 Laporan	217.333.800
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			300.000.000			330.000.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bertambahnya Kendaraan Pendukung Operasional Dinas (Unit)	Kota Ambon	8 unit	300.000.000		8 unit	330.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.440.159.080			1.570.734.987
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	4 Laporan	9.988.000		4 Laporan	10.986.800
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Ambon	12 Laporan	221.815.992		12 Laporan	243.997.591
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	4 Laporan	37.750.000		4 Laporan	41.525.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	12 Laporan	1.170.605.088		12 Laporan	1.274.225.596
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			268.988.000			295.886.800

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Ambon	3 Unit	79.994.000		3 Unit	87.993.400
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Ambon	1 Unit	188.994.000		1 Unit	207.893.400
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)			7.644.355.949			8.363.291.677
3.27.02.1.01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian			402.862.008			443.148.208
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Maluku Tengah dan Aru	2 Laporan	402.862.008		2 Laporan	443.148.208
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3.836.499.025			4.174.649.062
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	3 Sertifikat	64.958.900		3 Sertifikat	71.454.790
3.27.02.1.02.02	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	11 Kabupate n/kota	5 Laporan (Kabupaten)	1.674.999.920		5 Laporan (Kabupaten)	1.822.499.912
3.27.02.1.02.03	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu,	11 Kabupate n/kota	10 Laporan (Kabupaten/ Kota)	599.998.650		10 Laporan (Kabupaten/Kota)	634.498.650
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Perkebunan	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	11 Kabupate n/kota	4 Laporan (Kabupaten)	1.496.541.555,0		4 Laporan (Kabupaten)	1.646.195.710
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			49.999.600			54.999.560

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kota Ambon & Seram Bagian Timur	1 Laporan	49.999.600		1 Laporan	54.999.560
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			2.199.999.916			2.419.999.907
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ternak Ruminansia	Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat & Seram Bagian Timur	4 Laporan (Kabupaten)	2.199.999.916		4 Laporan (Kabupaten)	2.419.999.907
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain			1.154.995.400			1.270.494.940
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih Bibit Ternak yang sumbernya dari Provinsi Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Maluku Tengah, Buru, SBB, SBT & Kota Tual	9 Laporan (Kabupaten/ Kota)	1.154.995.400		3 Komoditas Peternakan (Sapi, Kambing dan Ayam Buras)	1.270.494.940
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Pertanian (ton)			4.884.991.266			5.373.490.392
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian			4.884.991.266			5.373.490.392
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Maluku Tengah dan Buru					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Buru, Malteng, SBT, Aru, Tual, Malra dan kota Ambon	3 Laporan (Komoditi)	739.999.200		3 Laporan (Komoditi)	813.999.120
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Kota Tual	5 Laporan (Kabupaten)	3.944.992.066		5 Laporan (Kabupaten)	4.339.491.272
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Koordinasi, Konsultasi dan Monev Kegiatan Rehabilitasi Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, dan Dipelihara	Buru Selatan, MBD, KKT, Kep.Aru & Luar Provinsi	1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	220.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TERKENDALINYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			145.024.500			159.526.950
3.27.04.1.01	Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			59.999.800			65.999.780
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Maluku Tengah, SBB, KKT, MBD & Kota Ambon	1 Laporan	59.999.800		1 Laporan	65.999.780
3.27.04.1.02	Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terawasnya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			47.512.500			52.263.750

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Ambon, Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru, Buru Selatan & Kota Tual	1 Laporan	47.512.500		1 Laporan	52.263.750
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			37.512.200			41.263.420
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Laporan Pengadaan Alat Pengolahan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Kota Ambon & Maluku Tengah	1 Laporan	37.512.200		1 Laporan	41.263.420
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PEMENUHAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			208.999.900			229.899.890
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendali dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian Provinsi			208.999.900			229.899.890
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Maluku Tengah & Seram Bagian Timur	50 Ha	208.999.900		50 Ha	229.899.890
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PEMENUHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN			79.940.000			87.934.000
3.27.06.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			79.940.000			87.934.000
3.27.06.1.01.02	Penilaian dan Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	11 Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	39.970.000		1 Dokumen	43.967.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	11 Kabupate n/ Kota	4 Laporan	39.970.000		4 Laporan	43.967.000
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian (%)			1.046.510.900			1.151.161.990
3.27.7.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			697.303.900			767.034.290
3.27.7.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	11 Kabupate n/ Kota	30 Orang	647.303.900		30 Orang	712.034.290
3.27.7.1.01.02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	11 Kabupate n/ Kota	50 Orang	50.000.000		50 Orang	55.000.000
3.27.7.1.02	Pengembangan Penyerapan Penyuluh Pertanian	Mengembangkan Penyerapan Penyuluh Pertanian			349.207.000			384.127.700
3.27.7.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	11 Kabupate n/ Kota & Provinsi Sumbar	1 Dokumen	299.207.000		1 Dokumen	329.127.700
3.27.7.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	11 Kabupate n/ Kota	22 Kelompok	50.000.000		22 Kelompok	55.000.000
J U M L A H					53.267.081.932,00			58.515.070.256,00

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan rencana kerja untuk tahun kelima periode RPJMD 2019 - 2024 yang memuat Kerangka Kerja Tahunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal dan kondisi eksternal. Dokumen Renja berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif SKPD. Kaidah - kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Dinas Pertanian, yaitu :

1. Unit - unit kerja dan seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program - program Rencana Kerja Dinas dengan sebaik - baiknya;
2. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2023, Dinas Pertanian berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun saran/tindak lanjut dalam kaitan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 diperlukan perhatian khusus untuk :

1. Peningkatan SDM, mengingat pentingnya kualitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi Dinas.

2. Penyediaan data dukung dan analisis kebijakan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas kelembagaan.;
3. Pengelolaan sentra-sentra produksi komoditas dengan berupaya mengoptimalkan semua sumberdaya yang dimiliki
4. Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana pembangunan pertanian yang masih minim
5. Adanya konsistensi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan

Ambon, 28 Januari 2023
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku

Dr. ILHAM TAUDA, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197412251998031005

